

# TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM BERITIKAD BAIK ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG BATAL KARENA HUKUM

*Marhara Tua Mulyadi Tambunan <sup>\*)</sup>*

*Ramli Siregar <sup>\*\*)</sup>*

*Windha <sup>\*\*\*)</sup>*

## ABSTRACT

*The responsibility of director as the result of negligence in performing the work to the stakeholders is as full responsibility. Regarding the responsibility, the director must return all losses suffered by stakeholders since repurchase of the shares is against the prevailed law in company.*

*The thesis studied some problems about the responsibility of director and stakeholders in running company, how is legal clause governing repurchase of share by the company, and how is the responsibility of director to stakeholders with good-will on repurchase of postponed shares by legal according to Act No 40 of 2007 concerning with limited company.*

*The method of research used was normative research method by collecting data from library and secondary data from books, articles, newspapers and magazines as well as laws. The results of research concluded that the responsibility of director is fully to implement and run the company, whereas the responsibility of stakeholder is limited to and focus on the principle of separate entity and corporate entity producing limited stakeholders. Legal clause governing repurchase of shares by the company is UUPT which allows the company to repurchase its shares and can be seen in article 37, article 38, article 39 and article 40 UUPT.*

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Pemegang Saham Beritikad Baik, Pembelian Kembali Saham.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (untuk selanjutnya disebut UU PT) mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar. Jika direksi terdiri dari dua anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Namun, jika RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas, dan

wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.<sup>1</sup>

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik yang meliputi aspek wajib dipercaya yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur, wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar, wajib loyal terhadap perseroan (*loyal duty*) tidak menggunakan dana aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan dan penuh tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh direksi terhadap kepengurusannya di dalam perusahaan.

<sup>\*)</sup> Penulis.

<sup>\*\*)</sup> Pembimbing I.

<sup>\*\*\*)</sup> Pembimbing II.

<sup>1</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris PT*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 78.

Menurut Pasal 3 UU PT, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah diambil.<sup>2</sup> Inilah ciri utama dari Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sebagai badan hukum yang mempunyai status *Persona in Judicio*.

Setiap pemegang saham yang merasa investasinya pada suatu perusahaan dengan bentuk PT sudah tidak relevan lagi dengan kegiatan utamanya dapat dengan mudah memperoleh kembali investasinya, yaitu dengan menjual saham tersebut. Demikian juga kiranya pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi pada suatu bidang usaha, tidak hanya dapat mendirikan usaha dari awal, melainkan juga dapat membeli saham dari pemegang saham yang sudah ada, atau meminta diterbitkannya saham baru atas nama dirinya melalui mekanisme yang telah ditentukan, yang selanjutnya menjadi pemegang saham yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PT.

Hal lain yang diberikan undang-undang kepada pemegang saham diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli perseroan:
  - a. Hak itu diberikan kepada setiap pemegang saham tanpa mempersoalkan berapa besar jumlah saham yang dimilikinya.
  - b. Dengan demikian, setiap pemegang saham dapat mempergunakan hak tersebut sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
2. Dasar alasan yang dibenarkan hukum meminta perseroan membeli saham pemegang saham
  - a. Apabila pemegang saham tersebut, tidak menyetujui tindakan perseroan.
  - b. Dan tindakan yang tidak disetujui itu, merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa tindakan:
    - 1) Perubahan anggaran dasar.

- 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan.
- 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
3. Pembelian saham yang diminta pemegang saham, tidak melebihi batas pembelian kembali saham oleh perseroan.

Pasal 37 ayat 1 huruf b UU PT, telah menetapkan batas kebolehan perseroan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan. Menurut ketentuan ini, jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan. Pembelian kembali saham yang bertentangan dengan ayat diatas maka pembelian tersebut bisa batal atau dapat dibatalkan karena hukum.

### PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi dasar penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian deskriptif yakni bagaimana tanggung jawab direksi dan pemegang saham dalam menjalankan suatu perusahaan, dan bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembelian kembali saham yang dilakukan oleh perseroan, kemudian bagaimana tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham beritikad baik atas pembelian kembali saham yang batal karena hukum ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 3.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM DALAM SUATU PERUSAHAAN

#### 1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut, sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.<sup>3</sup>

#### 2. Tanggung Jawab Pemegang Saham atau Pendiri Perseroan Dalam Perusahaan

Sifat perseroan merupakan perorangan dan *person* yang tidak terlihat, tidak meraba, atau abstrak dan artifisial. Namun demikian, perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan (*natural person*). Pada dasarnya, pemegang saham dari perseroan:

- Pemegang saham diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut.
- Akan tetapi, karena perseroan merupakan wujud yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang

saham tidak boleh menuntut aset perseroan.

- Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, oleh karena itu pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.<sup>4</sup>

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima persentase aset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi. Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijakan direksi. Akan tetapi, pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya.

Selain dari pada hal-hal yang dijelaskan diatas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham adalah tanggung jawab terbatas. Keuntungan itu, diberikan undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan melalui Pasal 3 ayat (1) UU PT, membatasi tanggung jawab dengan acuan:

- Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan.
- Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan.

<sup>3</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis PT*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 97.

<sup>4</sup>Daniel V. Davidson cs, *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, Kent Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition, 1987.

- c. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dikenal pembagian 2 orang pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas pengertian dari pemegang saham mayoritas, yaitu yang menguasai atau memiliki lebih dari setengah saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan adalah pemegang saham pengendali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham sama sekali tidak memiliki kontrol atas jalannya perseroan. Bagi mereka ini, pada umumnya diberikan perlindungan minimum oleh undang-undang atau *statute* yang berlaku bagi tiap-tiap negara.

Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan yang memiliki sekurang-kurangnya 10% saham dalam perseroan, untuk:

- Meminta diselenggarakannya RUPS (Pasal 79 ayat (2)).
- Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan dalam hal terdapat dugaan perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 ayat (3) UU PT).
- Memohon pembubaran perseroan (Pasal 146 ayat (1) UU PT).
- Mewakili perseroan untuk mengajukan menerbitkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 97 ayat (6) UU PT).
- Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap komisaris perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menerbitkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 114 ayat (6) UU PT), dan kepada pemegang saham antara lain untuk:

- Menerima deviden (Pasal 71 ayat (2) UU PT).
- Mengajukan gugatan terhadap perseroan bila mereka dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris perseroan (Pasal 61 UU PT).
- Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan yang berupa:
  - Perubahan anggaran dasar.
  - Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan atau.
  - Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (Pasal 62 ayat (1) UU PT).

### B. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN

#### 1. Perseroan Melakukan Pembelian Kembali Saham Oleh Perusahaan

Persyaratan yuridis yang diperlukan agar suatu perseroan dapat membeli kembali sahamnya adalah sebagai berikut:

- Harga pembelian diambil dari laba bersih perusahaan.
- Pengambilan harga pembelian tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan cadangan wajib.
- Pembelian kembali saham atau pengalihan lebih lanjut hanya dapat dilakukan lewat mekanisme RUPS perseroan.

Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau perusahaan publik:



- a. Jika saham yang dibeli kembali telah dijual pada harga yang lebih rendah, kerugian tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan laba-rugi emiten atau perusahaan publik
- b. *Emiten* atau perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan pada bursa efek dilarang membeli kembali sahamnya, jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham pada dasar atau dipenuhinya persyaratan delisting saham tersebut di brsa efek
- c. *Emiten* atau perusahaan publik dapat membeli kembali sahamnya sesuai ketentuan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>5</sup> tanpa

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 37.

- 1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
  - a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.
  - b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasr modal.
- 2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.
- 3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana yang diamsud pada ayat (2).
- 4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 38.

melanggar ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal<sup>6</sup>, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan ini.

- 1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) tau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebgaimana dimaksud apada ayat (1) sah apabila dilakukan dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 39:

- 1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
- 2) Penyerahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- 3) Penyerahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 40:

- 1) Saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat, tidak dapat diagunkan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan untuk menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 2) Saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian deviden.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 91: setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar,atau harga efek di bursa efek.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 92: Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk

## 2. Tuntutan Agar Saham Dapat Dibeli Dengan Harga Yang Wajar Oleh Perusahaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan, Pasal 62 UU PT<sup>7</sup> memberi hak kepada setiap pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham.

Hak itulah yang diberikan Pasal 126 ayat (2) UU PT<sup>8</sup> kepada pemegang saham yang "tidak setuju" kepada putusan RUPS mengenai peleburan. Apabila ada diantara pemegang saham tidak setuju atas peleburan, dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli perseroan dengan harga yang wajar, jika nyata-

membeli, menjual, atau menahan Efek.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 95: Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 96: Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 62 ayat (1): Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar.
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan.
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 126 ayat (2): Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

nyata secara objektif peleburan itu merugikan pemegang saham yang bersangkutan. Pembelian saham dengan harga yang wajar ini dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham dari tindakan yang sepihak. Karena pemegang saham dalam hal ini tidak boleh dirugikan, maka jika terjadi penggunaan ahli penilai harga saham biayanya ditanggung oleh perseroan meskipun untuk kepentingan pemegang saham.

## C. TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM BERITIKAD BAIK ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG BATAL KARENA HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

### 1. Pemegang Saham Beritikad Baik

Pemegang saham (*share holders*) sejatinya adalah seorang investor, mereka telah melakukan perbuatan hukum dengan cara menginvestasikan dananya pada sektor produktif. Sebagai seorang investor, mereka menghadapi resiko terhadap kemungkinan rugi yang dihadapi dari pengelolaan perusahaan. Dalam prinsip akuntansi dikatakan untung akan menambah modal dan rugi akan mengurangi modal. Kalau PT ketika menjalankan usahanya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada pemilik modal (dalam hal ini adalah pemegang saham). Sebaliknya, ketika PT memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut akan menambah modal fluktuasi ini sejatinya adalah resiko yang dipikul oleh pemegang saham.<sup>9</sup>

### 2. Tanggung Jawab Direksi Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian yang Diderita pemegang saham beritikad baik yang pembelian kembali sahamnya batal demi hukum

Dalam hal anggota direksi terdiri atas 2 orang lebih, Pasal 97 ayat (4) UU PT menegaskan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk en*

<sup>9</sup>Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 103-104.

*gezamenlijk aansprakelijk, jointy and severally liable*). Dengan demikian, apabila salah seorang anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan tersebut diatas, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.<sup>10</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum

Konteks bicara tentang perlindungan hukum terhadap direksi atas pembelian kembali saham yang batal karena hukum, maka setiap anggota direksi wajib untuk menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*), makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan perseroan adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undang, maka tindakan pengurusan melawan hukum (*onwettig, unlawful*) yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*). Atau bisa juga dikualifikasikan perbuatan *ultra vires* yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas (*beyond the authority*) perseroan. Dalam kasus yang demikian, anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi (*personally*

*liable*) atas segala kerugian yang timbul kepada perseroan.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham beritikad baik atas pembelian kembali saham yang batal karena hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah tanggung jawab secara renteng yang dilakukan oleh direksi atas pembelian kembali saham yang batal karena hukum. Tanggung jawab secara renteng ini haruslah berpedoman pada prinsip *business judgement rule* yaitu direksi harus melakukan tanggung jawabnya secara jujur, beritikad baik, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan.

### B. SARAN

Dalam hal tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham beritikad baik atas pembelian kembali saham yang batal karena hukum, maka seluruh kerugian yang diderita pemegang saham tersebut menjadi tanggung jawab direksi secara tanggung renteng, maka pihak direksi bagaimanapun caranya harus mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita pemegang saham tersebut. Dan bilamana jika tidak dikembalikan kerugian tersebut yang disebabkan karena direksi lalai mengemban tugasnya, pihak direksi akan dikenakan sanksi atau hukuman atas perbuatan yang dilakukannya tersebut sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

<sup>10</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.384.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Satrio Wicaksono, Frans, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Widjaja, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usah*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Yani Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1999.
- Davidson, Daniel V cs, *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, Kent Publishing Company, Boston Massachusetts. Second Edition, 1987.
- Budiyono, Try, *Hukum Perusahaan*, Salatiga : Griya Medan, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

